



Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



DINAS
KETENAGAKERJAAN
KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.






Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Dinas Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Majalengka, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Ketenagakerjaan,
Koperasi dan Usaha Kecil
Kabupaten Majalengka

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Kabid P3K2	
Kabid HI	
Kabid Koperasi	
Kabid UKM	




H. ABIF DARYANA, AP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770430 199603 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Dinas Kabupaten Majalengka Tahun 2025 memiliki Sasaran Strategis Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Meningkatnya Kualitas Koperasi, serta Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya dan Produk Lokal UMKM, dengan Indikator Kinerja Utama Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dan Tingkat produktivitas tenaga kerja, Persentase koperasi yang berkualitas, dan Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha.

Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dapat dihitung melalui jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100. Tingkat produktivitas tenaga kerja dapat dihitung melalui PDRB ADHB dibagi Jumlah Yang Bekerja, Persentase koperasi yang berkualitas dapat dihitung melalui jumlah koperasi yang melakukan RAT dibagi koperasi aktif dikali 100, dan Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha dapat dihitung melalui jumlah pelaku UMKM yang memiliki NIB dibagi jumlah UMKM dikali 100.

Capaian Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan adalah 100,01% dari target 98% dan realisasi 98,01%. Untuk capaian Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah 102,22% dari target Rp65.000.000 dan realisasi Rp67.461.921. Untuk capaian Persentase koperasi yang berkualitas adalah 157,81% dari target 42% dan realisasi 66,28%. Serta capaian Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha Adalah 234,17% dari target 35% dan realisasi 81,96%.

Adapun program yang mendukungnya yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) dan Pengembangan UMKM.

Efisiensi atas capaian sasaran strategis Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah Rp88.360.307. Efisiensi atas capaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Koperasi adalah Rp22.901.000. Efisiensi atas capaian sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya dan Produk Lokal UMKM adalah Rp1.483.496.

Daftar Isi

01

Kata Pengantar

02

Ringkasan Eksekutif

03

Daftar Isi

04

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum
Data Kepegawaian
Isu Strategis
Sistematika Pelaporan

11

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026
Perkin Tahun 2025
Rencana Anggaran Tahun 2025

16

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas Keuangan

57

BAB IV Penutup

59

Lampiran

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka

a. Kedudukan

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

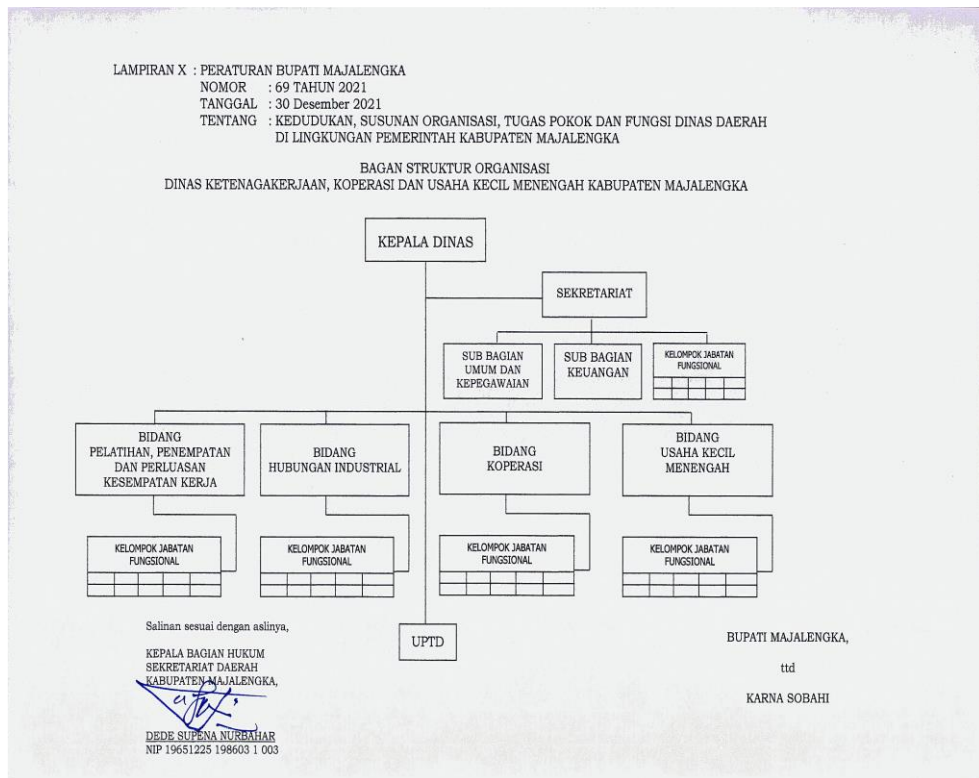
b. Tugas dan Fungsi

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, bidang Koperasi dan usaha mikro;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, bidang Koperasi dan usaha mikro;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan, bidang Koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan bidang Koperasi dan usaha mikro; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan Struktur Organisasi



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 28 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Perempuan: 10

Laki-laki: 20

b. Eselon

Eselon II a: -

Eselon II b: 1

Eselon III a: 1

Eselon III b: 4

Eselon IV a: 2

Eselon IV b: -

c. Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	IX
PNS	1	3	14	5	
PPPK					7

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi: 1

Jabatan Administrator: 5

Jabatan Pengawas: 2

Jabatan Fungsional: 5

Jabatan Pelaksana: 17

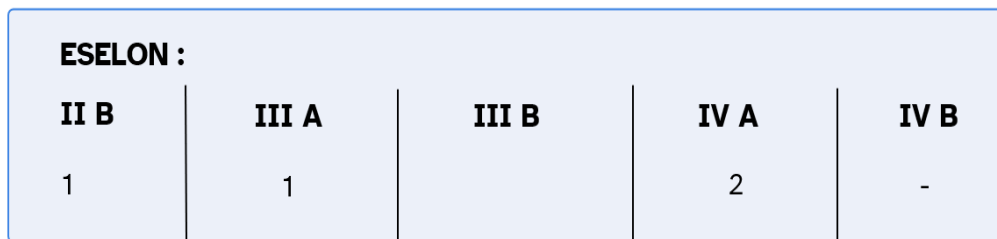
e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
1	1	6	-	-	-	20	2	-



Infografik ASN

DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



GOLONGAN

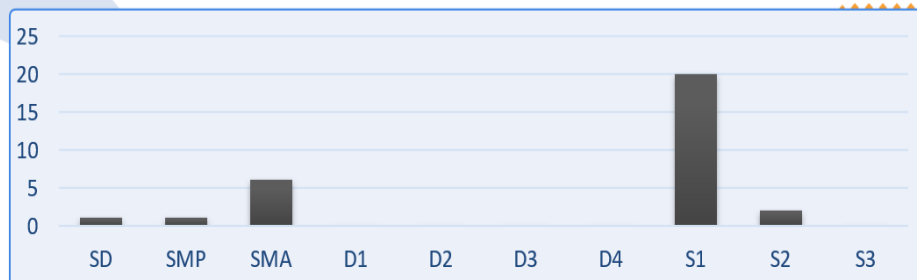
PNS



PPPK



PENDIDIKAN



1.3 Isu Strategis

Adapun permasalahan dan isu strategis Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka Adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesempatan kerja;
2. Rendahnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro menghadapi persaingan global;
3. Belum tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif.

Isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka adalah Pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi.

Oleh karena itu, pada Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka ditetapkan Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya dan Produk Lokal UMKM sebagai tujuan dan sasaran untuk Tahun 2024-2026. Sasaran strategis tersebut diharapkan dapat menanggapi isu strategis yang berkaitan dengan masih rendahnya kesempatan kerja, rendahnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro menghadapi persaingan global; serta Belum tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka, Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik, pencapaian atau prestasi (jika ada) serta SK Tim Penyusunan LKIP.



02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Tujuan
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya Kualitas Koperasi
Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya dan Produk Lokal UMKM

Sasaran
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya Kualitas Koperasi
Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya dan Produk Lokal UMKM

Indikator
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
Tingkat produktivitas tenaga kerja
Persentase koperasi yang berkualitas
Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut tabel Perjanjian Kinerja selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

Target Tahun 2025 pada sasaran Tingkat produktivitas tenaga kerja mengalami perubahan dikarenakan adanya perubahan formulasi/definisi operasional. Hal ini membuat target tersebut perlu disesuaikan lagi dari Rp339.000.000 menjadi Rp66.000.000, turun Rp273.000.000. Perubahan target tersebut didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp65,261,284,00. Sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	25	98	98,5	25	98	98,1
			Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rupiah	338 juta	339 juta	340 juta	65 juta	66 juta	67 juta
2.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	40	42	45	40	42	45
3.	Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM	Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Persen	30	35	40	30	35	40

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	98
		Tingkat produktivitas tenaga kerja	339 juta
2.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	42
3.	Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	35

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	98
		Tingkat produktivitas tenaga kerja	66 juta
2.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	42
3.	Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	35

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.148.070.023	50.82
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.938.547.362	19.14
Program Penempatan Tenaga Kerja	279.588.000	2.76
Program Hubungan Industrial	481.524600	4.75

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	419.874.400	4.15
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.136.520.000	11.22
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	26.364.000	0.26
Program Pengembangan UMKM	698.947.700	6.90

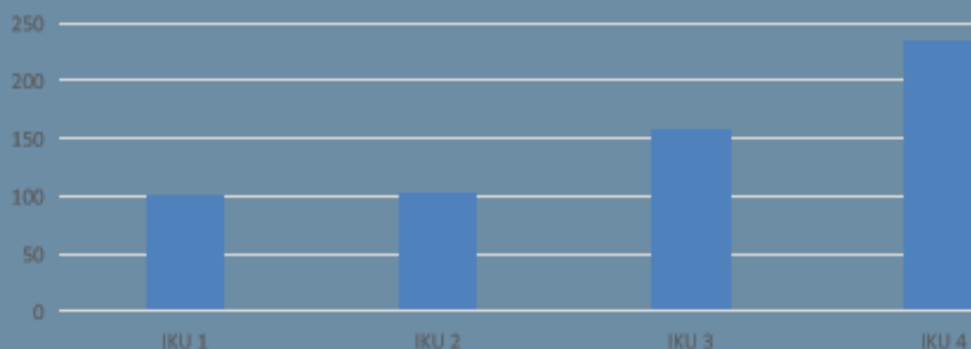
03

AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 3 Sasaran 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 148,55%. Sebanyak 4 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 0 Indikator tidak mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 3 Sasaran 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 148,55%. Sebanyak 4 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 0 Indikator tidak mencapai 100%.

3.1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	98%	98,01%	100,01%
		Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp66.000.000	Rp67.461.921	102,22%
2.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	42%	66,28%	157,81%
3.	Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	35%	81,96%	234,17%

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk menjawab isu strategis masih rendahnya kesempatan kerja, rendahnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro menghadapi persaingan global; serta belum tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif dan mewujudkan tujuan Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya dan Produk Lokal UMKM, maka ditetapkan sasaran strategis Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya dan Produk Lokal UMKM.

1. SASARAN SATU

- Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja merupakan indikator dalam pembangunan ketenagakerjaan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong daya saing ekonomi, serta mengurangi pengangguran. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan meningkatkan efisiensi hasil kerja. Peningkatan Penempatan berfokus pada perluasan kesempatan kerja, pelatihan, dan rekrutmen untuk menyerap tenaga kerja secara maksimal. Peningkatan Produktivitas menunjukkan kemampuan menghasilkan output lebih tinggi dengan input yang sama, yang dipengaruhi oleh investasi modal manusia, teknologi, dan pelatihan kerja.

Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan menjadi indikator dari Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang menurut Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.

Dalam pendekatan ini, Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dihitung menggunakan formula:

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / jumlah pencari kerja terdaftar x 100%, dengan sumber data dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.

- Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja menjadi indikator dari Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang menurut Badan Pusat Statistik, Produktivitas Tenaga Kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang atau jasa. Hal ini mencerminkan efisiensi ekonomi dan kualitas tenaga kerja.

Dalam pendekatan ini, Produktivitas Tenaga Kerja dihitung menggunakan formula:

PDRB ADHB dibagi Jumlah Yang Bekerja, dengan sumber data dari Badan Pusat Statistik.

IKU 1

Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan

Capaian Tahun 2025
100,01%

Target **98%** Realisasi **98,01%**

Realisasi Tahun 2024
97,77%

Target Akhir RPD
98.1%

Capaian Tahun 2024
309%

Realisasi
Provinsi/Pusat
55,85%

Faktor yang Mempengaruhi

1. Adanya Balai Latihan Kerja (BLK)
2. Diselenggarakannya Job Fair
3. Adanya pelatihan berbasis penempatan dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam rekrutmen tenaga kerja

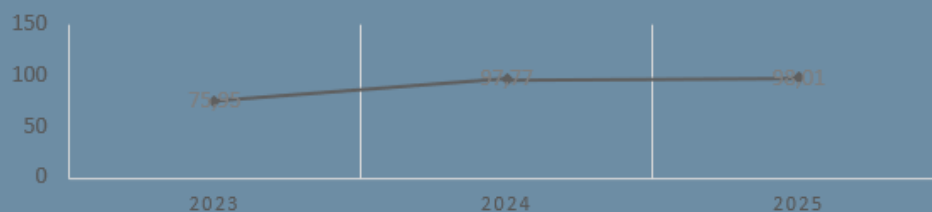
Program yang Mendukung

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu 2,02% atau sebesar Rp. 44,888,707.00 dari pagu anggaran Rp. 2,218,135,362.00 dengan realisasi Rp. 2,173,246,655.00.

Tren Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan



INDIKATOR 1

Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	98%	98,01%	100,01%

Pencapaian realisasi Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan melampaui target. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target pada Tahun 2025 yaitu sebesar 98,01% atau sebanyak 14.966 orang pencari kerja yang ditempatkan dari total jumlah pencari kerja terdaftar sebesar 15.300 orang.

Hal ini merupakan hasil dari inovasi Mata Hati yaitu rekrutmen tenaga kerja melalui Kerjasama/MoU antara BLK Cakraningrat Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Majalengka. Para pencari kerja dilatih di BLK kemudian setelah lulus pelatihan mereka langsung ditempatkan di Perusahaan-perusahaan tersebut. Melalui inovasi Mata Hati ini bisa terekrut sebanyak 5.305 orang. Sementara sisanya, sebanyak 9.661 orang direkrut melalui kegiatan job fair dan rekrutmen langsung oleh perusahaan sehingga penempatan tenaga kerja berhasil mencapai target.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	98,01%	97,77%	0,24%

Bila dibandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu, peningkatan Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan meningkat 0,24%, hal ini terjadi karena realisasi peningkatan pada tahun 2025 sebesar 98,01% (Pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 14.966

orang dan pencari kerja yang terdaftar sebanyak 15.300 orang). Sedangkan realisasi pada Tahun 2024 adalah 97,77% (Pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 14.971 orang dan pencari kerja yang terdaftar sebanyak 15.313 orang).

Hal ini merupakan hasil dari inovasi Mata Hati yaitu rekrutmen tenaga kerja melalui Kerjasama/MoU antara BLK Cakraningrat Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Majalengka. Para pencari kerja dilatih di BLK kemudian setelah lulus pelatihan mereka langsung ditempatkan di Perusahaan-perusahaan tersebut. Melalui inovasi Mata Hati ini bisa terekrut sebanyak 5.305 orang. Sementara sisanya, sebanyak 9.661 orang direkrut melalui kegiatan job fair dan rekrutmen langsung oleh perusahaan sehingga penempatan tenaga kerja berhasil mencapai target.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	100,01%	309%	-208,99

Bila dibandingkan capaian tahun ini dengan tahun lalu, terjadi penurunan sebanyak 209%. Hal ini bisa dilihat dari capaian tahun 2025 sebesar 100,01% sedangkan capaian pada tahun 2024 adalah 309%.

Hal ini karena pada tahun 2024 target hanya 25% dengan realisasi 97,77%, sementara pada tahun 2025 target melonjak menjadi 98% sehingga walaupun realisasi tahun 2025 yaitu 98,01% lebih besar dari tahun 2024 tetapi secara capaian lebih kecil dibanding tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	98,01%	98,1%	99,91%

Jika dibandingkan antara realisasi Tahun 2025 dengan target akhir Renstra, maka indikator ini belum mencapai target, baru mencapai 99,91 persen dari target akhir Renstra.

Hal ini karena SDM yang ada belum semuanya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan dan belum optimalnya penggunaan teknologi dalam penyampaian informasi lowongan kerja sehingga informasi tersebut belum tersebar secara optimal kepada pencari kerja.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	98,01%	55,83%	175,55%

Realisasi Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan tahun 2025 Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka sebesar 98,01 persen, lebih tinggi 42,18 persen dibandingkan dengan realisasi rata-rata Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebesar 55,83 persen.

Hal ini diantaranya karena pertumbuhan Perusahaan yang ada di Kabupaten Majalengka lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Barat sehingga penempatan tenaga kerja juga lebih banyak di banding rata-rata Provinsi Jawa Barat.

5. **Faktor** yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan **upaya yang telah dilakukan** dan **upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya**

Untuk Meningkatkan capaian indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan ini, didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu:

1. Pelatihan Pencari Kerja sebanyak 1.080 orang;
2. Identifikasi informasi lowongan Kerja sebanyak 17.331 lowongan kerja;
3. Identifikasinya Pencari Kerja yang Terdaftar sebanyak 15.300 orang;
4. Teridentifikasinya Pencari Kerja melalui Job Fair/Bursa Kerja sebanyak 5.477 orang.

Factor pendorong keberhasilan:

1. Adanya Balai Latihan Kerja (BLK)
2. Diselenggarakannya Job Fair
3. Adanya pelatihan berbasis penempatan dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam rekrutmen tenaga kerja

Selain itu, untuk meningkatkan capaian indikator presentase pencari kerja terdaftar didukung kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu:

1. Pelatihan menjahit, banyaknya permintaan angkatan kerja yang sudah memiliki skill dalam bidang garment. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari-Desember bertempat di BLK Pemerintah yang diikuti oleh 770 Orang.



2. Pelatihan manajemen mesin, adanya permintaan angkatan kerja memiliki skill di bidang perawatan mesin. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Nopember 2025 yang bertempat di BLK Pemerintah dan diikuti oleh 200 Orang.
3. Pelatihan tataboga, Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan wirausaha baru yang tertuju pada Masyarakat Angkatan kerja ekonomis. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September 2025 dengan diikuti oleh 60 Orang peserta yang bertempat di BLK Pemerintah.



4. Pelatihan sigaret kretek tangan, adanya permintaan dari industri rokok guna mendorong produksi unggul. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Nopember bertempat di PT. Kharisma Indah Bestari dan diikuti oleh 160 Orang.



5. Job fair penempatan tenaga kerja baru, mengurangi angka pengangguran dan memutus mata rantai pungli. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari-Desember yang bertempat di KIEM, BLK Cakraningrat dan LPK yang diikuti oleh 5.477 Orang.



6. Rekrutmen langsung yang difasilitasi pemerintah (BLK cakraningrat)/program mata hati. Penempatan tenaga kerja baru, mengurangi angka pengangguran dan memutus mata rantai pungli. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari-Desember di bertempat di KIEM, BLK dan LPK dan diikuti oleh 124 Peserta.



7. Kerjasama dengan SLBN majalengka (pekerja disabilitas) /program Mata Hati. Penempatan tenaga kerja baru, mengurangi angka pengangguran dan memutus mata rantai pungli. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari-Desember di bertempat di SLBN Majalengka dan diikuti oleh 72 Peserta.



Rencana kegiatan tahun 2026

1. Pelatihan Menjahit, banyaknya permintaan angkatan kerja yang sudah memiliki skill dalam bidang garment. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Bulan Maret-Desember dengan target peserta sebanyak 1200 Orang dan berlangsung di BLK Pemerintah.
2. Jobfair penempatan tenaga kerja baru, mengurangi angka pengangguran dan memutus mata rantai pungli Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Februari dan Bulan Nopember yang bertempat di SMK yang ditargetkan 550 Orang peserta.
3. Rekrutmen langsung yang difasilitasi pemerintah (BLK cakraningrat)/program mata hati 26. Penempatan tenaga kerja baru, mengurangi angka pengangguran dan memutus mata rantai pungli. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Januari-Desember yang bertempat di BLK Pemerintah dengan target 7.245 Orang.
4. Mou penempatan tenaga kerja dengan kawasan industri kertajati industrial estate, blk swasta,lpk (kiem)/program mata hati 26. Penempatan tenaga kerja baru, mengurangi angka pengangguran dan memutus mata rantai pungli. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Januari-Desember yang bertempat di KIEM,BLK dan LPK dengan target 130 Orang.
5. Kerjasama dengan SLBN majalengka (pekerja disabilitas) /progrgam mata hati 26. Penempatan tenaga kerja baru, mengurangi angka pengangguran dan memutus mata rantai pungli. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Januari-Desember yang bertempat di SLBN Majalengka dengan target 75 Orang.

Semua kegiatan/aktivitas tersebut telah dan akan meningkatkan kompetensi para pencari kerja dan meningkatkan perluasan kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan peluang mereka diterima di perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian target indikator kinerja persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.

6. **Program** yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Rp1.938.547.362
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Rp279.588.000

7. **Efisiensi**

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu 2,02% atau sebesar Rp44.888.707 dari pagu anggaran Rp2.218.135.362 dengan realisasi Rp2.173.246.655.

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh informasi di atas, Indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan merupakan instrumen yang kompatibel untuk mengukur capaian pada sasaran strategis Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja karena secara langsung mengukur efektivitas layanan penempatan dalam menjembatani *supply* (pencari kerja terdaftar) dan *demand* (lowongan kerja). Indikator ini mencerminkan keberhasilan penurunan pengangguran dan peningkatan penyerapan tenaga kerja secara kuantitatif.

IKU 2

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Capaian Tahun 2025 102,22%

Target	Realisasi
Rp66.000.000	Rp67.461.921

Realisasi Tahun 2024
Rp65.261.284

Target Akhir RPD
Rp67.000.00

Capaian Tahun 2024
100,4%

Realisasi
Provinsi/Pusat
Rp123.992.586

Faktor yang Mempengaruhi

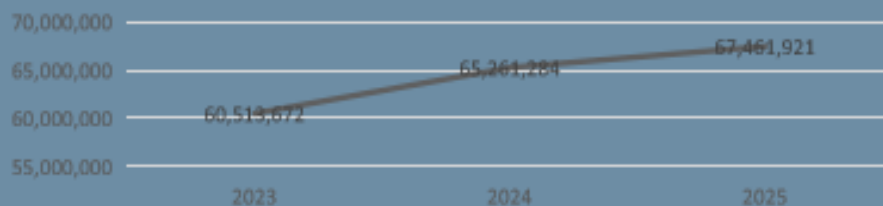
1. Optimalisasi LKS Tripartit;
2. Peningkatan Kapasitas Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja;
3. Peningkatan Kapasitas HRD Perusahaan;
4. Perumusan UMK;
5. Peningkatan Kualitas Sarana Hubungan Industrial.

Program yang Mendukung Program Hubungan Industrial

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu 9,03% atau sebesar Rp43.471.600 dari pagu anggaran Rp481.524.600 dengan realisasi Rp438.053.000.

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja



INDIKATOR 2

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp66.000.000	Rp67.461.921	102,22%

Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja tahun 2025 sebesar Rp67.461.921 dari target sebesar Rp66.000.000 atau 102,22 persen. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp67.461.921 tersebut diperoleh dari PDRB ADHB sebesar Rp50.566.150.000.000 dibagi jumlah tenaga kerja sebanyak 749.551 orang.

Realisasi target ini bisa diraih karena suasana hubungan Industrial yang relatif harmonis sehingga para pekerja bisa bekerja dengan tenang dan lebih produktif. Di samping itu, penyerapan tenaga kerja lokal yang tinggi dan peningkatan kompetensi melalui program BLK (Balai Latihan Kerja) seperti Program Mata Hati yang memfasilitasi ribuan pekerja. Sinergi antara industri dan kebijakan pemerintah daerah juga memperkuat iklim investasi, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta didukung oleh UMK yang kompetitif.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp65.261.284	Rp67.461.921	Rp2.200.637

Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja tahun 2025 mengalami kenaikan dibanding tahun 2024 sebesar Rp2.200.637, yaitu sebesar Rp65.261.284 pada tahun 2024 menjadi Rp67.461.921 pada tahun 2025.

Peningkatan realisasi ini bisa diraih karena beberapa faktor diantaranya:

1. Peningkatan Penyerapan Sektor Jasa & Manufaktur.
Sektor jasa dan manufaktur di Kabupaten Majalengka menunjukkan tren kenaikan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, menggantikan sektor pertanian yang menurun.
2. Peningkatan Kualitas SDM.
Fokus pemerintah daerah pada peningkatan kualitas SDM dan upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mendukung produktivitas.
3. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT di Majalengka terus menurun dari tahun ke tahun, menandakan semakin banyak angkatan kerja yang terserap produktif.
4. Pembangunan Infrastruktur.
Pertumbuhan infrastruktur penunjang, terutama dampak dari kawasan industri, meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor usaha.

Dengan demikian, peralihan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa, didukung oleh tenaga kerja yang lebih terampil, menjadi pendorong utama kenaikan produktivitas di Majalengka..

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	100,40%	102,22%	1,82%

Capaian Tingkat produktivitas tenaga kerja tahun 2025, mengalami peningkatan sebesar 1,82% dibandingkan capaian tahun 2024.

Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM.
Fokus pada pelatihan dan peningkatan kompetensi kerja yang membuat pekerja lebih terampil.
2. Adopsi Teknologi.
Penggunaan teknologi digital meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses produksi.
3. Struktur Ketenagakerjaan.
Meningkatnya jumlah pekerja penuh waktu dibandingkan pekerja paruh waktu, yang menandakan penyerapan tenaga kerja yang lebih produktif.
4. Perbaikan Manajemen.
Pengendalian kebijakan dan peningkatan efisiensi di berbagai perusahaan.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp67.461.921	Rp67.000.000	Rp461.921

Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2025 dengan target Renstra, dimana realisasi tahun 2025 sebesar Rp67.461.921 dan target Renstra sebesar Rp67.000.000, maka realisasi tahun 2025 melebihi target Renstra sebesar Rp461.921.

Hal ini karena peningkatan investasi yang signifikan dan juga didukung oleh pertumbuhan konsisten selama lima tahun terakhir, yang didorong oleh perbaikan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, adopsi teknologi, dan peningkatan efisiensi operasional secara umum.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Rata-rata Provinsi	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp67.461.921	Rp123.992.586	- Rp59.530.665

Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2025 yaitu sebesar Rp67.461.921 dengan realisasi rata-rata Provinsi Jawa Barat tahun 2025 yaitu sebesar Rp123.992.586, maka realisasinya masih lebih rendah sebesar Rp59.530.665.

Rendahnya produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Majalengka dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat utamanya disebabkan oleh struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dan UMKM, bukan industri modern/padat modal. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum optimal, keterbatasan pendidikan/keterampilan, serta tingginya angka pekerja informal menjadi faktor penghambat utama.

5. **Faktor** yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan **upaya yang telah dilakukan** dan **upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya**

- Untuk meningkatkan capaian indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja ini, didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu:
 1. Pendataan jumlah perusahaan yang Memiliki Fasilitas Kesehatan dan Kesejahteraan sebanyak 353 perusahaan;
 2. Pembinaan perusahaan tentang hak dan kewajiban perusahaan dan tenaga kerja kepada 150 orang anggota serikat pekerja;
 3. Pembinaan perusahaan tentang penerapan struktur Skala Upah kepada kepada 40 orang HRD perusahaan;
 4. Pembinaan Serikat Pekerja di Perusahaan sebanyak 150 orang;
 5. Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 6 kasus;
 6. Fasilitasi LKS Tripartit Kabupaten sebanyak 1 lembaga;
 7. Pembinaan Bipartit di Perusahaan kepada 150 orang pekerja;
 8. Sosialisasi Peraturan tentang Jaminan Sosial di Perusahaan kepada 150 orang HRD perusahaan;
 9. Sosialisasi ketentuan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kepada 150 orang HRD perusahaan;
 10. Sosialisasi ketentuan pembuatan peraturan perusahaan (PP) kepada 150 orang HRD perusahaan.
- Faktor pendukung tercapainya indikator ini diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Optimalisasi LKS Tripartit;
 2. Peningkatan Kapasitas Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja;
 3. Peningkatan Kapasitas HRD Perusahaan;
 4. Perumusan UMK;
 5. Peningkatan Kualitas Sarana Hubungan Industrial.
- Untuk meningkatkan capaian indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja ini, didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu:
 1. PEJANTAN KEREN, Adanya Perusahaan yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, belum terpenuhinya pekerja disabilitas diperusahaan dan Terlindunginya kesejahteraan para pekerja/buruh. Kegiatan ini melibatkan para pekerja/buruh/disabilitas dengan jumlah 150 Perusahaan yang dimulai pada tanggal 27 Maret dan dilakukan setiap satu minggu sekali yang bertempat di Aula Abdi Praja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.



2. Ngariung Bareng Tripartit, berlatar belakang pada Permasalahan dari perusahaan kadang tidak sesuai dengan tripartit maka di selesaikannya harus melakukan pembinaan tripartit selain itu Komunikasi antar unsur tripartit baik unsur pemerintah pengusaha baik serikat buruh belum berjalan dengan baik. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 12 Juni 2025 dan diikuti oleh 16 Orang dari unsur Pemerintah, APINDO, serikat pekerja dan serikat Tripartit bertempat di Gedung Yudha Kabupaten Majalengka.



3. SIDIA PERTAMA (Sistem Digital Pembayaran Retribusi Tenaga Kerja Asing Majalengka) Perusahaan memberi kerja TKA blum memahami terkait masalah restribusi TKA secara efisien. Kegiatan ini diikuti oleh para HRD Perusahaan dengan jumlah 40 Orang yang bertempat di Hotel Fitra pada tanggal 22 Oktober 2025.



4. Pembinaan pada perusahaan pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA), Masih banyak pekerja perusahaan TKA yang belum memahami tentang manajemen pengelolaan penggunaan TKA. Pada kegiatan ini masih melibatkan HRD Perusahaan dengan jumlah 40 Orang yang berlangsung di Hotel Fitra pada tanggal 04 Nopember 2025.
5. Rekonsiliasi bersama kementerian terkait redistribusi perpanjangan RPTKA, Masih banyak pekerja perusahaan TKA yang belum memahami tentang manajemen pengelolaan penggunaan TKA dan mensinkronkan data TKA. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025 bertempat di Aula Abdi Praja dan diikuti oleh 19 Orang HRD Perusahaan.
6. Rapat Pra Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten, Sebagaimana ketentuan bahwa Pentapan UMK oleh Gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten. Dalam membuat rekomendasi UMK DEPEKAB melaksanakan sidang Pleno untuk menghitung besar UMK sebagai bahan rekomendasi. Sehingga Rapat Pleno menjadi tahapan yang harus dilaksanakan, Kegiatan ini melibatkan beberapa unsur salah satunya anggota dewan pengupahan kabupaten majalengka, unsur pemerintah, APINDO, serikat pekerja, Akademisi dan Pakar yang berjumlah 19 Orang yang bertempat di Aula Abdi Praja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tanggal 22 Desember 2025.



Rencana kegiatan 2026

1. PIL KB, Rendahnya pemahaman literasi keuangan di kalangan pekerja/buruh berpotensi menjerumuskan mereka ke dalam praktik pinjaman online ilegal (pinjol) dan lembaga keuangan informal (bank emok) yang merugikan. Praktik tersebut sering menimbulkan beban keuangan, tekanan psikologis, serta berdampak pada produktivitas kerja. Oleh karena itu, peningkatan inklusivitas literasi keuangan bagi buruh (PIL KB) dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap praktik keuangan

ilegal. Kegiatan ini sasarannya pekerja buruh atau buruh yang ada di Kabupaten Majalengka dengan jumlah 205 Orang yang tergabung dalam 40 Perusahaan dan akan sedang berlangsung pada tanggal 03 Februari 2026 bertempat di masing-masing Perusahaan.

6. **Program** yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial	Rp481.524.600

7. **Efisiensi** anggaran jika IKU **mencapai** 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu 9,03% atau sebesar Rp43.471.600 dari pagu anggaran Rp481.524.600 dengan realisasi Rp438.053.000.

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh informasi di atas, Indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja merupakan instrumen yang kompatibel untuk mengukur capaian pada sasaran strategis Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja karena secara langsung mengukur perbandingan antara hasil kerja (output) yang dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau jam kerja yang digunakan. Indikator ini mencerminkan efisiensi dan kualitas penempatan, serta menjadi cerminan daya saing tenaga kerja.

Indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja mendukung sasaran strategis karena keduanya mengukur keberhasilan penyandingan kompetensi (*matchmaking*) antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja, serta menunjukkan kualitas output pekerja. Penempatan tinggi mengurangi pengangguran (penempatan tenaga kerja), sementara produktivitas tinggi meningkatkan output ekonomi (produktivitas tenaga kerja).

2. SASARAN KEDUA

Meningkatnya Kualitas Koperasi merupakan indikator dalam pembangunan perkoperasian. Kualitas ini tercermin dari penerapan prinsip koperasi yang konsisten, peningkatan kapasitas SDM, tata kelola yang baik, digitalisasi, serta kontribusi riil terhadap kesejahteraan anggota dan ekonomi lokal.

Sasaran ini memiliki korelasi langsung dengan sasaran Kabupaten Majalengka, dalam hal ini sasaran Bupati Majalengka. Meningkatnya kualitas koperasi di Majalengka berkorelasi langsung dengan sasaran strategis Bupati untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini karena Koperasi berkualitas menjadi penggerak ekonomi desa (melalui KDKMP-Koperasi Desa/Keluarahan Merah Putih), mempermudah akses permodalan UMKM, serta menumbuhkan produk lokal, yang secara langsung mendukung target kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Persentase Koperasi yang berkualitas menjadi indikator dari Meningkatnya Kualitas Koperasi yang menurut Kementerian Koperasi Republik Indonesia, koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang berbasis anggota, sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara berkelanjutan. Koperasi ini dicirikan oleh tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap nilai kekeluargaan, gotong royong, dan kinerja keuangan yang sehat.

Dalam pendekatan ini, Persentase Koperasi yang berkualitas dihitung menggunakan formula:

Jumlah koperasi yang melakukan RAT / koperasi aktif x 100%, dengan sumber data dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.

IKU 3

Persentase Koperasi yang Berkualitas

Capaian Tahun 2025
157,81%

Target	Realisasi
42%	66,28%

Realisasi Tahun 2024

57,96%

Target Akhir RPD

45%

Capaian Tahun 2024

145%

Realisasi
Provinsi/Pusat

64,27%

Faktor yang Mempengaruhi

1. Intensitas pendampingan lapangan oleh para Pendamping Koperasi pada aspek :
 - a) kelengkapan legalitas perkoperasian
 - b) pendampingan rencana pelaksanaan RAT Koperasi
 - c) pendampingan ekspansi usaha koperasi
2. Penyelenggaraan forum perkoperasian yang menghadirkan para ketua koperasi dalam rangka mengeksplorasi potensi usaha koperasi, dinamika permasalahan, dan upaya kemitraan koperasi.

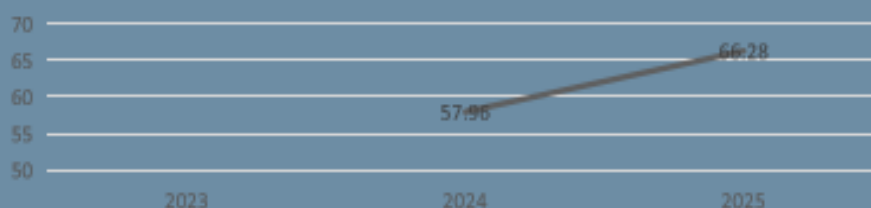
Program yang Mendukung

1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas pada sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi yaitu 1,47% atau sebesar Rp22.901.000 dari pagu anggaran Rp1.556.394.400 dengan realisasi Rp1.533.493.400.

Persentase Koperasi yang Berkualitas



INDIKATOR 3

Persentase Koperasi yang Berkualitas

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	42%	66,28%	157,81%

Realisasi Persentase Koperasi yang Berkualitas melampaui target. Hal ini dilihat dari tercapainya target pada Tahun 2025 yaitu sebesar 66,28% atau sebanyak 570 koperasi Aktif dari total jumlah koperasi sebanyak 860 koperasi.

Hal ini karena intensifnya penilaian (terasesmennya) kualitas koperasi secara berkala. Hal ini juga dipicu oleh adanya 570 koperasi yang aktif dan potensial untuk terus direvitalisasi dari total 860 unit terdaftar, serta penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi di berbagai kecamatan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	66,28%	57,96%	8,32%

Bila dibandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu, terjadi kenaikan sebanyak 8,32%. Hal ini bisa dilihat dari capaian tahun 2025 sebesar 66,28% sedangkan capaian pada tahun 2024 adalah 57,96%.

Faktor-faktor pendukung kenaikan realisasi tersebut diantaranya:

1. Peningkatan Kualitas SDM, dengan fokus pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas anggota dan pengurus koperasi agar lebih kompetitif.
2. Pemanfaatan Potensi Lokal, dengan melakukan optimalisasi sektor unggulan daerah, seperti agrowisata (misalnya, durian Sinapeul) dan potensi wisata lainnya.
3. Optimalisasi Akses Keuangan, dimana Koperasi berperan aktif sebagai penyedia layanan keuangan bagi UMKM, yang meningkatkan dampak sosial ekonomi masyarakat.

4. Tata Kelola yang Lebih Baik, melalui perbaikan manajemen dan tata kelola untuk mengatasi kelemahan konvensional, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi.
5. Dukungan Pemerintah, dimana meskipun ada efisiensi anggaran, fokus pada program yang tepat sasaran tetap dilakukan untuk meningkatkan kualitas koperasi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	157,81%	145%	12,81%

Bila dibandingkan capaian tahun ini dengan tahun lalu, terjadi kenaikan sebanyak 12,81%. Hal ini bisa dilihat dari capaian tahun 2025 sebesar 157,81% sedangkan capaian pada tahun 2024 adalah 145%.

Faktor utama kenaikan capaian tersebut antara lain:

1. Peningkatan Kompetensi SDM, melalui pelatihan intensif bagi pengelola koperasi untuk meningkatkan profesionalisme.
2. Digitalisasi & Manajemen Modern, melalui penerapan sistem digital untuk menata arsip dan meminimalisir piutang macet.
3. Peningkatan Pengawasan, melalui penguatan pengawasan internal untuk memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	66,28%	45%	147,28%

Jika dibandingkan antara realisasi Tahun 2024 dengan target akhir Renstra, maka indikator ini sudah mencapai target bahkan melebihi target sebesar 21,28%.

Hal ini juga dipicu oleh adanya 570 koperasi yang aktif dan potensial untuk terus direvitalisasi dari total 860 unit terdaftar, serta penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi di berbagai kecamatan.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	66,28%	64,27%	2,01%

Apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat tahun 2025, realisasi tahun 2025 lebih tinggi sebesar 2,01%.

Hal ini karena adanya fokus intensif pada penguatan kelembagaan, optimalisasi permodalan, serta pemanfaatan potensi keunggulan lokal yang terintegrasi (seperti agrowisata dan hilirisasi produk). Pendekatan ini meningkatkan efisiensi dan tata kelola, menjadikannya lebih unggul.

5. **Faktor** yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan **upaya yang telah dilakukan** dan **upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya**

- Untuk meningkatkan capaian indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas ini, didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu:
 1. Pelaksanaan asesmen koperasi sebanyak 343 koperasi;
 2. Pemantauan koperasi tentang penerapan ketentuan koperasi sebanyak 50 koperasi;
 3. Sosialisasikan tentang tata cara pendirian koperasi kepada masyarakat sebanyak 686 orang;
 4. Penyaluran bantuan sarana/prasarana bagi Koperasi Baru kepada 1 koperasi.
- Faktor Pendukung Pencapaian Persentase Koperasi yang Berkualitas:
 1. Intensitas pendampingan lapangan oleh para Pendamping Koperasi pada aspek :
 - a) kelengkapan legalitas perkoperasian
 - b) pendampingan rencana pelaksanaan RAT Koperasi
 - c) pendampingan ekspansi usaha koperasi
 2. Penyelenggaraan forum perkoperasian yang menghadirkan para ketua koperasi dalam rangka mengeksplorasi potensi usaha koperasi, dinamika permasalahan, dan upaya kemitraan koperasi.
- Untuk meningkatkan capaian indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas ini, didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu:

1. Bimbingan Teknis Forum Perkoperasian

Terbentuknya forum perkoperasian di Kabupaten Majalengka berakar dari kebutuhan untuk mewartakan, membina, dan menyatukan berbagai koperasi yang tersebar di Kabupaten Majalengka guna mencapai tujuan ekonomi Bersama, kegiatan ini diikuti oleh 80 Peserta (Ketua pengurus dan Pengawas Koperasi) pada Bulan Maret 2025 bertempat di Gedung Nyi Rambut Kasih Kabupaten Majalengka.

2. Fasilitasi Badan Hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

Program strategis pemerintah Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari desa dengan menggerakkan koperasi, berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tentang asas kekeluargaan dan gotong royong, demi mencapai swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan kemandirian bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Juli 2025 yang diikuti oleh 343 Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka yang bertempat di Desa/Kelurahan masing-masing.



3. Bimbingan Teknis Dasar-dasar Perko-perasian Sub Kegiatan Peningkatan Pema-haman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Bimtek Koperasi Merah Putih (Kopdes/kelurahan) berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2025) untuk mempercepat penguatan ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, dan mengentaskan kemiskinan berbasis potensi lokal. Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat melalui koperasi mandiri, modern, dan berdaya saing sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 sd 29 Oktober 2025 dan 03 sd 05 Nopember 2025 yang diikuti oleh 686 Peserta yang terdiri dari Pengurus Desa/Kelurahan Merah Putih yang bertempat di Kampus STAI PUI Majalengka.



4. Sinergy Actin Expo (SAE)

Kegiatan SAE (Sinergy Action Expo) berakar pada upaya Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk memperkuat ekonomi desa dari akar rumput melalui fasilitasi kemitraan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan Mitra BUMN/Swasta. Program ini dirancang sebagai solusi atas tantangan ketimpangan ekonomi dan perlunya mempercepat distribusi pangan serta komoditas strategis di tingkat desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2025 bertempat di Rest Area Cikebo yang diikuti oleh 66 Peserta Koperasi Desa Merah Putih.



5. Bimbingan Teknis Lanjutan Dasar-dasar Perkoperasian.

Pelaksanaan Bimtek didorong oleh kebutuhan penguatan kapasitas manajerial, literasi digital, dan legalitas pengurus untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Hal ini bertujuan mempercepat penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, dan mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui koperasi profesional, transparan, dan berbasis teknologi. Bimtek ini mencakup penguatan kapasitas dan tata Kelola koperasi dan kepatuhan regulasi tentang perkoperasian. Kegiatan ini diikuti oleh 343 Peserta pada bulan Juli Triwulan III 2025 bertempat di Majalengka

6. Peringatan Hari Koperasi, Pelaksanaan peringatan hari Koperasi Tahun 2026 menjadi momentum untuk mengenang sejarah dan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi serta sosial serta mendorong partisipasi lebih luas dalam gerakan koperasi.

Pemerintah Kabupaten Majalengka memandang perlu menumbuhkan kembali semangat berkoperasi untuk peningkatan kesejahteraan anggota dan Masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli 2025 di Majalengka yang diikuti oleh 343 Peserta

6. **Program** yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Bidang Koperasi	Rp419.874.400
2.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Bidang Koperasi	Rp1.136.520.000

7. **Efisiensi**

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas pada sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi yaitu 1,47% atau sebesar Rp22.901.000 dari pagu anggaran Rp1.556.394.400 dengan realisasi Rp1.533.493.400.

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh informasi di atas, Indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas merupakan instrumen yang kompatibel untuk mengukur capaian pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Koperasi karena indikator ini secara langsung mencerminkan perbaikan tata kelola, kinerja usaha, dan kepatuhan administratif koperasi. Pengukuran ini fokus pada output konkrit (jumlah koperasi yang memenuhi standar kualitas) daripada sekadar jumlah koperasi aktif, sehingga selaras dengan upaya pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan untuk meningkatkan daya saing.

3. SASARAN KETIGA

Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM merupakan indikator dalam Pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini merupakan hasil dari transformasi digital, inovasi produk, serta peningkatan standar kualitas agar mampu menembus pasar global dan bersaing dengan produk impor. Hal ini dicapai melalui program strategis seperti pendampingan, sertifikasi, kemitraan, dan permodalan (KUR).

Meningkatnya daya saing UMKM di Majalengka berkorelasi langsung dengan sasaran strategis Bupati, khususnya dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas produk dan kapabilitas SDM lokal agar mampu bersaing di pasar nasional, yang merupakan prioritas pembangunan.

Dengan mendongkrak daya saing produk lokal, UMKM berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) daerah dan pemerataan pendapatan masyarakat.

UMKM juga merupakan penyedia lapangan kerja, sehingga penguatannya sejalan dengan target pengurangan angka pengangguran di Majalengka.

Peningkatan kapasitas UMKM berfokus pada pengolahan keunggulan lokal (agrowisata, oleh-oleh, kerajinan) menjadi produk bernilai jual tinggi.

Pemkab mendorong UMKM agar lebih mudah mengakses permodalan (seperti KUR) dan teknologi untuk memperluas pemasaran.

Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha menjadi indikator dari Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM yang menurut Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha Adalah unit usaha produktif berskala kecil milik individu/rumah tangga—dengan aset maksimal Rp50 juta (di luar tanah/bangunan) atau omzet tahunan maksimal Rp300 juta—yang dikelola dengan jiwa kewirausahaan, berani berinovasi, berisiko, serta bertujuan mengembangkan usaha. Contohnya meliputi katering rumahan, warung kelontong, kuliner (warmindo/angkringan), laundry, dan kerajinan tangan.

Dalam pendekatan ini, Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha dihitung menggunakan formula:

Jumlah Pelaku UMKM yang Memiliki NIB / Jumlah Seluruh Pelaku UMKM x 100%, dengan sumber data dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.

IKU 4

Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha

Capaian Tahun 2025
234,17%

Target **35%**
Realisasi **81,96%**

Realisasi Tahun 2024

65,42%

Target Akhir RPD

40%

Capaian Tahun 2024

218%

Realisasi
Provinsi/Pusat

11,19%

Faktor yang Mempengaruhi

1. Pendampingan yang intensif kepada para pelaku UMKM
2. Fasilitasi perijinan yang diperlukan pelaku UMKM
3. Fasilitasi pelaku UMKM dengan pihak ketiga

Program yang Mendukung

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
2. Program Pengembangan UMKM

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha pada sasaran Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM yaitu 0,2% atau sebesar Rp1.483.496 dari pagu anggaran Rp725.311.700 dengan realisasi Rp723.828.204

Persentase Koperasi yang Berkualitas



INDIKATOR 4

Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	35%	81,96%	234,17%

Realisasi Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha melampaui target. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target pada Tahun 2025 yaitu sebesar 81,96% atau sebanyak 61.218 UMKM yang telah memiliki NIB dari total jumlah UMKM sebanyak 74.691.

Hal ini karena adanya peningkatan kualitas SDM UKM melalui pelatihan intensif dan sosialisasi tata cara pengelolaan usaha yang lebih efektif. Program ini berhasil meningkatkan keahlian pelaku usaha mikro untuk naik kelas menjadi wirausaha mandiri.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	81,96%	65,42%	16,54%

Bila dibandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu, terjadi kenaikan sebanyak 16,54%. Hal ini bisa dilihat dari capaian tahun 2025 sebesar 81,96% sedangkan capaian pada tahun 2024 adalah 65,42%.

Hal ini karena adanya peningkatan infrastruktur yang mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif, kemudahan perizinan usaha gratis, serta potensi keunggulan lokal yang tinggi. Sinergi ini mempercepat pertumbuhan UMKM dan perhotelan di wilayah tersebut

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	234,17%	218%	16,17%

Bila dibandingkan capaian tahun ini dengan tahun lalu, terjadi kenaikan sebanyak 16,17%. Hal ini bisa dilihat dari capaian tahun 2025 sebesar 234,17% sedangkan capaian pada tahun 2024 adalah 218%.

Hal ini karena kuatnya potensi keunggulan lokal (wisata dan kuliner), program pelatihan kompetensi UMKM, kemudahan akses modal (KUR), dan sertifikasi produk (halal/SNI). Sinergi kebijakan ini mempercepat produktivitas dan daya saing usaha mikro.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	81,96%	40%	41,96%

Jika dibandingkan antara realisasi Tahun 2025 dengan target akhir Renstra, maka indikator ini sudah mencapai target bahkan melebihi target sebesar 41,96%.

Hal ini karena adanya peningkatan kualitas SDM UKM melalui pelatihan intensif dan sosialisasi tata cara pengelolaan usaha yang lebih efektif. adanya intensifikasi sosialisasi tata cara pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM. Hal ini didukung oleh peningkatan kualitas produk berbasis keunggulan lokal, serta pelatihan pemasaran digital dan bantuan modal untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif. Program ini berhasil meningkatkan keahlian pelaku usaha mikro untuk naik kelas menjadi wirausaha mandiri.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	81,96%	11,19%	70,77%

Apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat tahun 2025 yaitu 11,19%, realisasi tahun 2025 lebih tinggi sebesar 70,77%. Hal ini karena ada faktor pendukung antara lain:

1. Penyaluran Kredit Produktif Tinggi, melalui adanya kolaborasi OJK-Pemkab dalam penyaluran KUR sehingga memudahkan usaha mikro naik kelas.
 2. Penguatan Ekosistem UMKM, dimana pemerintah aktif mendorong kebijakan "bela dan beli produk dalam negeri" serta pengembangan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
 3. Keunggulan Potensi Lokal, dimana potensi wisata (Panyaweuyan, dll) dan produk lokal (seperti bola Piala Dunia) yang mendunia, memberikan pasar riil bagi wirausaha lokal.
 4. Penurunan Angka Pengangguran & Kemiskinan, dimana Tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi 3,62% pada 2025 menunjukkan peralihan cepat dari pekerja informal/pengangguran menjadi wirausaha.
5. **Faktor** yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan **upaya yang telah dilakukan** dan **upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya**
- Untuk meningkatkan capaian indikator Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha ini, didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu:
 1. Sosialisasi tata cara pengajuan NIB bagi UMKM sebanyak 250 orang;
 2. Program Pertumbuhan Usaha Mikro sebanyak 50 orang;
 3. Pelatihan SDM UKM tentang Pemasaran sebanyak 25 orang;
 4. Pertemuan UKM dengan Pihak Ketiga sebanyak 2 kali.
 - Faktor yang mempengaruhi keberhasilan diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Pendampingan yang intensif kepada para pelaku UMKM
 2. Fasilitasi perijinan yang diperlukan pelaku UMKM
 3. Fasilitasi pelaku UMKM dengan pihak ketiga

- Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 1. Gerakan Start Up yang Inovatif dan Kompetitif (GASIK) Kegiatan ini dilaksanakan supaya mendorong UMKM dan startup lokal naik kelas, tembus pasar global, dan mendongkrak ekonomi daerah melalui inovasi, pendanaan, serta akses ekosistem bisnis yang lebih luas, Kegiatan Gerakan Start Up yang Inovatif dan Kompetitif (GASIK) dilaksanakan untuk mendorong UMKM naik kelas, meningkatkan daya saing, serta memperluas akses pasar hingga global melalui pendampingan, mentoring, dan bantuan modal. Kegiatan ini diikuti oleh 25 Pelaku usaha Mikro, pada 14 s.d 28 April 2025 bertempat di Aula Abdi Praja, Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.



2. Bantuan Kelompok Usaha Mikro

Kegiatan ini memberikan bantuan pada kelompok usaha UMKM dilatarbelakangi oleh peran krusial UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, penyerap tenaga kerja terbesar, dan penggerak ekonomi inklusif yang rentan terhadap krisis. Pemberian bantuan kelompok usaha UMKM dilaksanakan untuk meningkatkan permodalan, kapasitas SDM, akses pasar, dan keberlanjutan bisnis, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi, mengurangi pengangguran, serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Pemberian bantuan ini diberikan sebanyak 8 kelompok usaha mikro yang dilaksanakan pada bulan Nopember dan Bulan Desember 2025 bertempat di Kecamatan Cigasong, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Majalengka, Kecamatan Jatiwangi, Kecamatan Leuwimunding dan Kecamatan Rajagaluh.



6. **Program** yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Bidang Usaha Kecil dan Menengah	26,364,000.00
2.	Program Pengembangan UMKM	Bidang Usaha Kecil dan Menengah	Rp698.947.700

7. **Efisiensi**

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha pada sasaran Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM yaitu 0,2% atau sebesar Rp1.483.496 dari pagu anggaran Rp725.311.700 dengan realisasi Rp723.828.204.

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh informasi di atas, Indikator Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha merupakan instrumen yang kompatibel untuk mengukur capaian pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Koperasi karena mencerminkan transformasi usaha dari informal/subsisten menjadi lebih produktif, mandiri, dan berorientasi pasar. Kenaikan jumlah ini menandakan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan koperasi yang berhasil.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	100,01%	97,98%
		Tingkat produktivitas tenaga kerja	102,220%	90,97%
2.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	157,81%	98,53%
3.	Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	234,17%	99,8%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat anggaran sebesar 3,47% atau Rp351.928.932 yang tidak terserap. Anggaran yang tidak terserap tersebut merupakan anggaran untuk belanja barang dan jasa, tidak terserap karena anggaran yang terserap sudah mencukupi untuk mencapai target kinerja.



04

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis yaitu sebesar 148%. Dari 4 IKU, semuanya tercapai bahkan melebihi target. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen dan kerjasama SDM di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka dalam menjalankan tugas.

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada Tahun 2025 sebesar 3,47% atau Rp351.928.932.

Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholderterkait dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil dan berdampak bagi masyarakat.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.



LAMPIRAN

LAMPIRAN

Perkin

Cascading

Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan

Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup PD

Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik

Pencapaian/prestasi PD (jika ada)

SK Tim LKIP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. ARIF DARYANA, A.P., M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, November 2025

Pihak Pertama,



H. ARIF DARYANA, A.P., M.Si.
NIP: 19770430 199603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	98 %
		Tingkat produktivitas tenaga kerja	66.000.000 Rupiah
2.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	42 %
3.	Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	35 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.148.070.023,00	APBD
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 1.938.547.362,00	APBD
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 279.588.000,00	APBD
4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 481.524.600,00	APBD
5.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 419.874.400,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 1.136.520.000,00	APBD
7.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 26.364.000,00	APBD
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 698.947.700,00	APBD
JUMLAH		Rp 10.129.436.085,00	

Majalengka, November 2025

Eupati Majalengka,



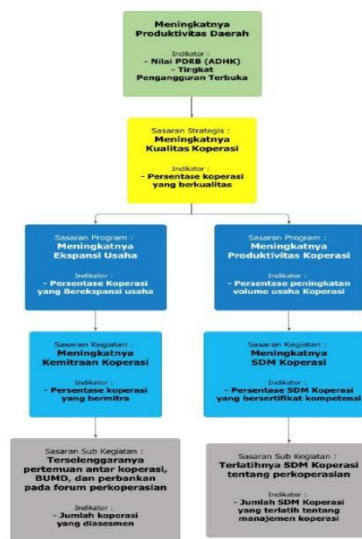
Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

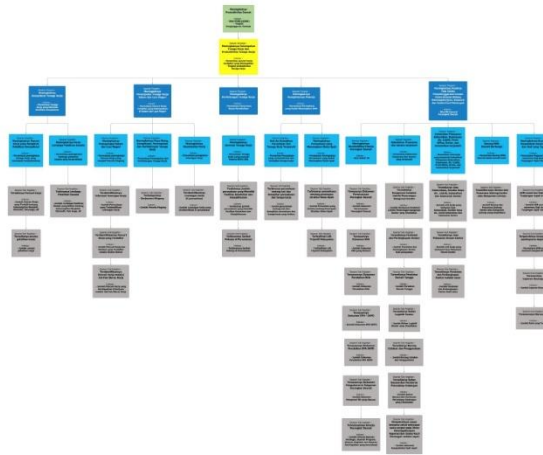
Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

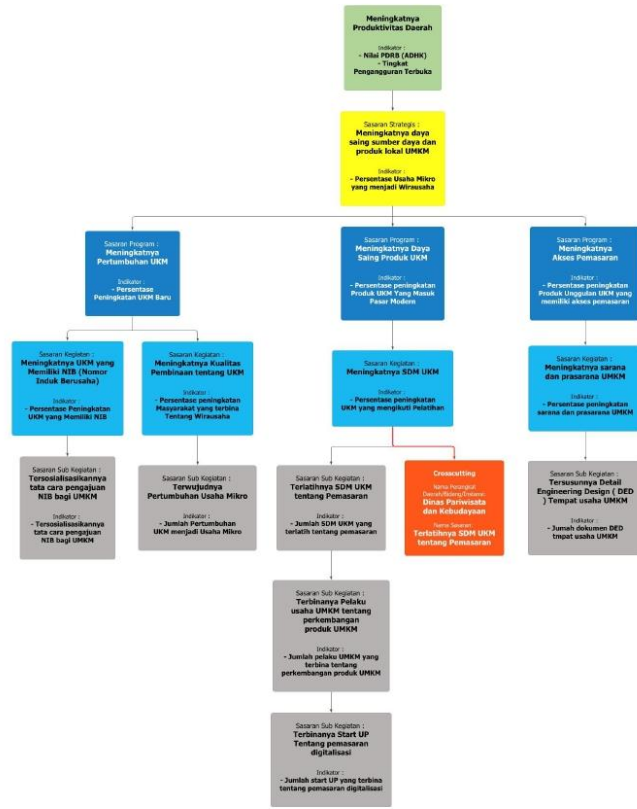


H. ARIF DARYANA, A.P., M.Si.
NIP. 19770430 199603 1 001

CASCADING TAHUN 2025







DOKUMENTASI PENYERAHAN LKIP KEPADA PIMPINAN





**BUKTI SEBAR LKIP DAN DOKUMENTASI PEMBAHASAN LKIP
KEPADA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUP DK2UKM**



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KETENAGAKERJAAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Alamat: Jalan Suma No. 422 Telp./Fax (0233) 8291693 Majalengka 45411
Email : dlsnakerkukm28@gmail.com

Majalengka, 27 Februari 2026

Nomor : 000.7/72/Perencanaan/2026/M
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyebaran Informasi
LKIP Dinas K2UKM Tahun 2025

Yth. Seluruh Pegawai
Di Lingkungan Dinas K2UKM Kabupaten Majalengka
di
Tempat

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang menyajikan realisasi capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang bisa digunakan sebagai bahan tindak lanjut bagi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka untuk perbaikan capaian kinerja pada Tahun 2026.

Selanjutnya kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka untuk dapat mengakses dokumen LKIP Tahun 2025 tersebut pada tautan: https://drive.google.com/drive/folders/1rVjYX5VES_gFOzEd6RVLlhipUpyU0AAq?usp=sharing.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Majalengka,



Arif Daryana, AP, M.Si.
Pina Utama Muda
19770430 199603 1 001

08.53

61



DINAS K2UKM
5 online



Waktu

08.42

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KETENAGAKERJAAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Alamat: Jalan Suma No. 422 Telp./Fax (0233) 8291693 Majalengka-45411
Email : disakerkum28@gmail.com

Majalengka, 27 Februari 2026

Nomor : 000.7/72/Perencanaan/2026/M
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyebaran Informasi
LKIP Dinas K2UKM Tahun 2025

Yth. Seluruh Pegawai
Di Lingkungan Dinas K2UKM Kabupaten Majalengka
di
Tempat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang menyajikan realisasi capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang bisa digunakan sebagai bahan tindak lanjut bagi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka untuk perbaikan capaian kinerja pada Tahun 2026.

Selanjutnya kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka untuk dapat mengakses dokumen LKIP Tahun 2025 tersebut pada tautan:
https://drive.google.com/drive/folders/1rVjYX5VES_gFOzEd6RVLlhipUpyU0AAq?usp=sharing

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Majalengka,

D. Anayana, Ap, M.Si.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Majalengka
19770430 199603 1 001

HD

Ijin menyampaikan informasi terkait LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas K2UKM Tahun 2025, Agar seluruh pegawai di Lingkungan Dinas K2UKM Kab.Majalengka dapat mengakses dokumen LKIP dimaksud, pada Link yang tercantum dalam surat diatas.
(https://drive.google.com/drive/folders/1rVjYX5VES_gFOzEd6RVLlhipUpyU0AAq?usp=sharing.)
Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terimakasih 🙏

08.46 ✓



Ketik pesan



**PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEGAWAI DENGAN KINERJA TERBAIK**





Piagam Penghargaan

DIBERIKAN KEPADA :

NANA SUJANA, S.Sos

Sebagai Pegawai Berkinerja Terbaik pada Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
Tahun 2025

Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Majalengka



PENCAPAIAN/PRESTASI



Kabupaten Majalengka menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada ajang CNN Indonesia Award 2025, Kabupaten Majalengka berhasil meraih penghargaan bergengsi untuk kategori Leading Innovative Employment and Community Marketplace Model.

Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan program MATA HATI (Masyarakat Cepat Kerja Hadirkan Kebahagiaan Kuatkan Inklusi) yang digagas oleh **Pemerintah Kabupaten Majalengka (dalam hal ini, dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka)** sebagai terobosan dalam menciptakan sistem rekrutmen kerja yang jujur, transparan, dan berpihak pada rakyat.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KETENAGAKERJAAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Alamat: Jalan Suma No. 422 Telp./Fax (0233) 8291693 Majalengka 45411
Email : disnakerkukm28@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR: 000.7/Kep.61/perencana/2026/M

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312) ;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/ 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: Keputusan Kepala Dinas Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Dinas Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.
- KE SATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Dinas Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Majalengka Tahun 2025 dengan susunan personalia dan Uraian Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KE DUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
 - b. Menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
 - c. Menyusun materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
 - d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
 - e. Melaksanakan pendistribusian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Majalengka
Pada Tanggal : 6 Februari 2026

KEPALA KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 000.7/Kep.61/perencana/2026/M

TANGGAL : 6 Februari 2026

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2025**

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
2. Ketua : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kabupaten Majalengka
3. Sekretaris : Fungsional Perencana Ahli Muda Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kabupaten Majalengka
4. Anggota :
 1. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
 2. Para Kepala Sub Bagian/Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;

3. Seluruh staf di Lingkungan Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka

KEPALA KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

